

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.2004.

Bambang, *Hukum Jaminan dan Kepailitan*. 2003.

Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni,2000.

Murtadha Mutahhari, *Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1995,

Roman Tomasic, *Insolvency Law in The East Asia*, Ashgate Publishing Limited, England, 2005.

Whitney dan Milholland, *Colorado State College of Education*.1932

Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan kewaiban pembayaran hutang*, Bandung: Alumni, 2010.

Ikhwansyah Isis, Sastrawidjaya, dan Cinintya Putri Deany, *Hukum Kepailitan Analisis Jaminan Perorangan (Personal Guarantor) Dalam Perkara Kepailitan*, Bandung: CV Keni Media, 2019.

Benny Wulur, *Kewenangan Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Sita Pidana Terhadap Harta Pailit*, Bandung: Alumni, 2019.

B. Jurnal

Trias Palupi Kurnianingrum, *Peluang Indonesia Dalam Perdagangan Bebas*.
Jurnal Penelitian Politik vol . 7 No 2 2002.

Marjan E. Pane, “Sekilas Tentang Tugas dan Wewenang Kurator”, makalah dalam
Prosiding Kepailitan dan Transfer Aset Secara Melawan Hukum, Pusat
Pengkajian Hukum, Jakarta, 2005

Rahmat Bastian, “Prinsip Hukum Kepailitan Lintas Yurisdiksi”, makalah dalam
Prosiding Kepailitan dan Transfer Aset Secara Melawan Hukum, Pusat
Pengkajian Hukum, Jakarta, 2005.

Ratnawati Prasodjo, “Pembubaran dan Likuidasi Perseroan Terbatas”, makalah
dalam Prosiding Perseroan Terbatas dan Good Corporate
Governance, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2004.

Ricardo Simanjuntak, “Aspek Komparasi Dari Kepailitan (Cross-Border
Bankruptcy) dan Studi Kasus”, makalah dalam Prosiding Hukum tentang
Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya, Pusat Pengkajian
Hukum, Jakarta, 2005

C. Peraturan Perundang – undangan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011

Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 16 Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

D. Wawancara

Hasil wawancara dengan Dr. Benny Wullur, S.H., M.H. Kes, CLA, CLI, CTL, CCL, CPL, CPCLE, ACIArb, CH, CHt advokat/mediator/ahli hukum kesehatan/ ahli hukum pasar modal/auditor hukum/ likuidator/ kuasa hukum pengadilan pajak/ kuasa hukum kepabeanan- cukai/ pengadaan/ ahli hukum kontrak pengadaan/ arbiter/ahli hukum kepailitan dan PKPU/ Kurator dan pengurus